



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN**

**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI  
DALAM RANGKA MENINJAU DAN MELIHAT SECARA LANGSUNG  
PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
MASA SIDANG I TAHUN 2019-2020**

\*

\*

\*

\*\*

\*\*\*

\*\*

\*

\*

\*

**JAKARTA 2019**



**LAPORAN**  
**KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI**  
**DALAM RANGKA MENINJAU DAN MELIHAT SECARA LANGSUNG**  
**PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**  
**DI KABUPATEN PULANG PISAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**7-9 NOVEMBER 2019**

-----

**I. PENDAHULUAN**

**A. DASAR KUNJUNGAN KERJA**

- a. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
  - a. Pasal 58 ayat 3 huruf d terkait dengan Tugas Komisi dalam bidang pengawasan yaitu melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
  - b. Pasal 58 ayat 4 terkait dengan Tugas komisi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat mengadakan kunjungan kerja.
- b. Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019.
- c. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI, tanggal 31 Oktober 2019.

**B. RUANG LINGKUP**

Sasaran Kunjungan Kerja meliputi bidang-bidang yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi IV, yaitu Bidang Pertanian, Bulog, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan.

### C. SUSUNAN TIM

Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, antara lain:

No.	Nama	Fraksi
1.	H. DEDI MULYADI, S.H.	WK.KETUA KOM. IV/F.PG
2.	DANIEL JOHAN, S.E.	WK. KETUA KOM.IV/F.PKB
3.	H. SUNARNA, S.E., M.Hum.	ANGGOTA/F.PDIP
4.	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
5.	VITA ERVINA, S.E.	ANGGOTA/F.PDIP
6.	AA. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H.	ANGGOTA/F.PG
7.	BUDHY SETIAWAN	ANGGOTA/F.PG
8.	YESSY MELANIA, S.E.	ANGGOTA/F.NASDEM
9.	ERWARD TANNUR, S.H.	ANGGOTA/F.PKB
10.	BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.	ANGGOTA/F.PD
11.	H. JOHAN ROSIHAN, S.T.	ANGGOTA/F.PKS
12.	SLAMET ARIYADI, S.PS.	ANGGOTA/F.PAN

### D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, untuk:

1. Melihat secara langsung keberadaan titik koordinat hutan dan Lahan yang terbakar di Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Menyerap aspirasi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan dan lahan di Kab. Pulang Pisau dan berdiskusi dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait, stakeholder.
3. Mencari formula solusi dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan sehingga mendapatkan gambaran umum terkait tindakan *preventif* dari Pemerintah dan stakeholder terkait dalam menanggulangi bencana kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.

### E. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik dilaksanakan pada tanggal 7-9 November 2019.

## **F. OBJEK KUNJUNGAN KERJA**

Objek yang menjadi fokus perhatian kunjungan kerja adalah keberadaan titik koordinat kebakaran hutan dan lahan di Kab. Pulang Pisau Kalimantan Tengah.

## **G. GAMBARAN UMUM**

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) adalah salah satu peristiwa yang cukup menyita perhatian karena terjadi setiap tahun dan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Karhutla berdampak pada rusaknya ekosistem dan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Asap yang ditimbulkan juga menjadi polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pada saluran pernafasan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA), asma, penyakit paru obstruktif kronik. Selain itu, asap bisa mengganggu jarak pandang, terutama untuk transportasi penerbangan.

Dampak lainnya adalah:

1. tersebarnya asap dan emisi gas karbondioksida dan gas-gas lain ke udara yang memicu pemanasan global dan perubahan iklim;
2. hutan menjadi gundul sehingga tak mampu menampung cadangan air saat musim hujan. Hal ini menjadi faktor terjadinya tanah longsor maupun banjir;
3. hutan menjadi kering dan sumber air menjadi terbatas karena sebagai penampung cadangan air.

Adapun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2019 luas kawasan hutan dan lahan terbakar yang tersebar di 6 provinsi mencapai lebih dari 857.000 hektar. Hal itu merupakan bencana karhutla terbesar dalam 3 tahun terakhir. Selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat kejadian karhutla sejak Januari hingga September 2019 seluas 857.756 hektar dengan rincian lahan mineral seluas 630.451 hektar dan lahan gambut seluas 227.304 hektar. Terdapat 6 provinsi dengan jumlah karhutla tertinggi yakni Provinsi Kalimantan Tengah seluas 134.227 hektar, Provinsi Kalimantan Barat seluas 127.462 hektar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 113.454 hektar, Provinsi Riau seluas 75.871 hektar, Provinsi Sumatera Selatan seluas 52.716 hektar dan Provinsi Jambi seluas 39.638 hektar.

Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada umumnya oleh kondisi alam dan aktivitas manusia. Aktivitas manusia sering kali menjadi salah satu penyebab utama kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, persoalan kebakaran hutan dan lahan harus diatasi dengan upaya memperkuat tindakan pencegahan daripada upaya penanganan/pengendalian, seperti mewajibkan pencegahan kebakaran secara komprehensif pada korporasi, pemerintah dan masyarakat sehingga fungsi pengawasan menjadi suatu kebutuhan bersama.

## H. HASIL KUNJUNGAN

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI selain melihat kebakaran hutan dan lahan, juga melakukan pertemuan dengan pemangku kepentingan Masyarakat Kab. Pulang Pisau di kantor Dinas Gubernur Kalimantan Tengah. Dari hasil pertemuan didapatkan beberapa informasi, diantaranya:

1. Pemerintah Kalteng diwakili oleh Asisten Gubernur Drs. Nurul Edy, M.Si.
  - Provinsi Kalimantan Tengah memiliki wilayah seluas ±153.564 km<sup>2</sup> persegi atau 15,35 juta Hektar (hampir 1,5 kali luas Pulau Jawa), memiliki gambut seluas kurang lebih 3 juta hektar (sekitar 19,6% dari luas wilayah provinsi).
  - Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yaitu 17,3 jiwa per km persegi sehingga mempunyai tantangan akan bahaya atau ancaman kebakaran hutan dan lahan yang relatif sangat besar.
  - Gubernur Kalimantan Tengah menetapkan status “Siaga Darurat” bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 28 Mei 2019 s.d 26 Agustus 2019, kemudian diperpanjang 27 Agustus s.d 30 Oktober 2019. Adapun berdasarkan evaluasi tanggal 17 September s.d 30 September 2019, statusnya dinaikkan menjadi “Tanggap Darurat”.
  - Sejak 1 Oktober s.d 30 Oktober 2019, statusnya diturunkan menjadi Transisi Darurat ke Pemulihan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalteng.
  - Kabupaten/Kota yang menetapkan status siaga darurat sebanyak 12 kabupaten/kota, terkecuali Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten

Sukamara, sedangkan yang menaikkan status menjadi tanggap darurat sebanyak 3 kabupaten/kota yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Selatan.

- Personil yang terlibat dalam penanganan karhutla sekitar 10.015 orang, dukungan *water bombing* dan heli patroli dari BNPB sebanyak 10 helikopter, dukungan teknologi modifikasi cuaca dari BNPB dan BPPT sebanyak 1 pesawat, dimana luas areal kebakaran yang dapat ditangani sekitar 12.880 Hektar.
- Tanggal 4 November 2019, dalam rangka “Mewujudkan Kalimantan Tengah Bebas Kabut Asap Tahun 2020” Gubernur memerintahkan kepada Bupati Walikota seluruh Kalimantan Tengah untuk:
  - a) Memperkuat upaya-upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi karhutla 2020, dimulai sejak bulan Januari 2020, jangan tunggu ada kejadian kebakaran baru mulai bergerak.
  - b) Memantapkan personil reaksi cepat penanganan karhutla dan melengkapinya dengan peralatan yang memadai. Optimalkan keterlibatan masyarakat yang selama ini sudah dilatih. Lengkapi alatnya dan sediakan anggaran operasionalnya sehingga mereka bisa mendukung reaksi cepat jika ada kejadian kebakaran. Jangan biar kejadian kebakaran membesar baru ditangani, sedini mungkin dipadamkan.
  - c) Penetapan keadaan darurat bencana karhutla secara tepat, mulai dari siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat. Kabupaten Kota yang belum menetapkan pedoman dalam penetapan keadaan darurat bencana karhutla agar segera diselesaikan sehingga tahun 2020 tidak lagi ragu-ragu dalam menetapkan keadaan darurat.
  - d) Karhutla tanggap jawab bersama seluruh pihak, pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, media dan juga perguruan tinggi akademisi, agar seluruhnya bersinergi positif. Pemerintah daerah pastikan semua berperan sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitas yang dimiliki.
  - e) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan karhutla baik itu melalui anggaran murni maupun anggaran darurat.



2. Badan Restorasi Gambut (BRG) diwakili oleh Ibu Myrna Safitri (Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan)

- Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Karhutla di Istana Negara telah menggarisbawahi bahwa karhutla merupakan permasalahan dan prioritas nasional serta memberikan arahan tegas untuk mengedepankan upaya pencegahan dan pengendalian.
- Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sepanjang Januari 2019 hingga Juli 2019, terdapat 135.747 ha hutan dan lahan yang terbakar.
- Beberapa provinsi yang terkena dampak signifikan dari peristiwa kebakaran ini adalah provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.
- Dalam upaya mewujudkan target 1.000 Desa Peduli Gambut, selain pendanaan dari APBN, BRG juga bekerjasama dengan pihak swasta dan mitra kerja restorasi gambut lain, termasuk Kemitraan-Partnership. Sejak memulai Program DPG November 2017 hingga Oktober 2019 Kemitraan-Partnership telah bekerja mendampingi 109 Desa/Kampung di 7 Propinsi.
- Kemitraan/Partnership sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan termasuk dalam

bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam juga menaruh perhatian serius dalam upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

- Melalui program Desa Peduli Gambut (DPG) yang dikerjakan bersama Badan Restorasi Gambut (BRG), Kemitraan mengembangkan model pencegahan dan penanggulangan karhutla di kawasan desa-desa gambut.
- Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh kemitraan, yaitu:
  - a) Mengembangkan platform pemantauan publik berbasis daring guna menyediakan akses bagi masyarakat yang tinggal di kawasan gambut untuk berbagi informasi serta pengetahuan terkait pengelolaan ekosistem gambut termasuk melaporkan kejadian karhutla yang terjadi di desa
  - b) Memberikan informasi perkembangan sebaran titik panas (hotspot) sebagai sistem deteksi dini untuk pencegahan karhutla kepada perwakilan Project Management Unit di 7 Provinsi guna diteruskan kepada masing-masing Fasilitator DPG agar dapat dicek ke lapangan kebenarannya.
  - a) Mendorong koordinasi lintas pihak dalam pencegahan serta penanggulangan karhutla dengan memberikan suplai informasi terkini (waktu dan koordinat) dari tapak melalui fasilitator Desa Peduli Gambut kepada kanal informasi koordinasi poslap gabungan dari satuan tugas karhutla di Kabupaten Pulang Pisau sebagai laporan awal untuk investigasi lanjutan satgas karhutla.
  - b) Melakukan kerja pemetaan wilayah terbakar pada periode Juli 2019 dengan teknologi drone secara kolaboratif bersama satgas karhutla yang terdiri dari lintas OPD serta lembaga (TNI, Kepolisian) di 5 desa di Pulang Pisau (Desa Gandang Barat, Wono Agung, Buntoi, Tanjung Taruna dan Tumbang Nusa). Hasilnya ditemukan estimasi luasan terbakar di 5 desa mencapai +/- 1,110 Ha.
  - c) Melakukan advokasi kebijakan dalam mendorong ditetapkannya status “Siaga Darurat Bencana Karhutla” bersama BPBD, TRGD, DLH dan OPD (SK Bupati Pulang Pisau No 219/2019 dan Surat Edaran Nomor. 660/204/DPMD/VIII/2019).



- d) Mendorong dan mendampingi desa-desa yang masuk dalam program DPG untuk mengusulkan kegiatan pembasahan lahan gambut serta penanggulangan bencana masuk ke dalam agenda pembangunan desa (RKPDDes dan APBDes).
- e) Mendorong TRGD, pemerintah desa dan kelompok masyarakat peduli api di desa-desa gambut untuk melakukan kegiatan operasi pembasahan lahan gambut rawan kekeringan (OPGRK) dengan memanfaatkan infrastruktur pembasahan yang telah terbangun di desa dan operasi pembasahan cepat lahan gambut terbakar (OPCGLT) pada wilayah yang belum terbangun infrastruktur pembasahan gambut.
- f) Membagikan alat pengaman diri masker N-95 kepada warga dewasa dan anak-anak yang terkena dampak asap karhutla di Desa Tanjung Taruna dan Tumbang Nusa serta anggota tim di Poslap penanggulangan karhutla di Kecamatan Jabiren Raya, Maluku dan Sebangau Kuala, Kab. Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
- g) Bekerjasama dengan jejaring masyarakat sipil di daerah untuk melakukan pemantauan independen terhadap kegiatan restorasi gambut di areal budidaya berizin sebagai upaya perbaikan tata kelola kebijakan bagi pengelolaan ekosistem gambut dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan (karhutla).
- h) Mendorong forum koordinasi lintas pihak dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, TRGD, BPBD, Manggala Agni, TNI, Kepolisian untuk mendiskusikan pembelajaran serta merumuskan strategi pencegahan dan penanganan karhutla di tingkat kabupaten.

Aspirasi/masukan:

1. Pemerintah Kalteng meminta dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan karena menjadi urusan wajib layanan dasar Pemda sehingga perlu dukungan anggaran yang memadai dari Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kalteng meminta perluasan dukungan Program Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang menggunakan teknologi.

3. Pemerintah Kalteng meminta dukungan peralatan pemadaman Karhutla yang bisa dioperasikan sampai jarak jauh.
4. Kepala Desa Tanjung Taruna Kalteng memohon agar Satgas Pencegahan Kebakaran Hutan di setiap desa setidaknya ada 20 orang dengan diberi upah Rp 1,5 juta per bulan dan bantuan operasional.

### FOTO-FOTO KEGIATAN



## I. KESIMPULAN

- a. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan “Alokasi Dana Desa untuk Restorasi Gambut” guna pencegahan kebakaran hutan dan lahan sejak dini.
- b. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi agar menyiapkan “Tenaga Pendamping Desa” untuk mencegah kebakaran dan atau pembakaran di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Terkait mekanisme rekrutmen bisa dengan cara merekrut tenaga kontrak, tenaga honorer, atau tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- c. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan Hak Pengelolaan Hutan Adat atau Hutan Sosial bagi Masyarakat Adat Kalimantan Tengah dalam rangka kelestarian hutan dan keberlanjutan ekosistem.
- d. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah agar tidak memberikan ruang bagi korporasi atau pengusaha yang melakukan pembakaran hutan untuk berbisnis di sektor Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan karena merusak sumber daya alam yang ada.
- e. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk memberikan sanksi tegas dan tindakan hukum terhadap orang/pemilik hutan atau lahan yang membakar hutan dan lahan, artinya tidak hanya mencabut ijin perusahaannya saja namun juga pemilikinya.
- f. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi tentang dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang berpihak kepada masyarakat adat setempat.

- g. Komisi IV DPR RI meminta kepada pemerintah untuk mendukung inisiasi DPR RI terkait dengan regulasi Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

## **J. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja spesifik Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga laporan ini dapat bermanfaat. Aamiiiin.

Jakarta, November 2019

**Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik  
Komisi IV DPR RI,**

Ttd.

**H. DEDI MULYADI, S.H.**

**A-294**

## **LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT**

<http://dpr.go.id/berita/detail/id/26387/t/Komisi+IV+Kunjungi+Lokasi+Terdampak+K+arhutla+di+Kalteng>

<http://www.teropongsenayan.com/106855-tinjau-karhutla-kalteng-ini-yang-ditemukan-komisi-iv>

<https://kalteng.antaranews.com/berita/352988/bpbd-pulpis-sampaikan-kendala-penanganan-karhutla-kepada-komisi-iv-dpr-ri>

<https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/8955/komisi-iv-dpr-ri-kunker-bahas-penanganan-karhutla-di-kalteng>

[https://kaltengpos.co/berita/-35109-kunjungi\\_pulpis\\_komisi\\_iv\\_dapat\\_masukan\\_soal\\_kesejahteraan\\_relawan\\_satgas\\_karhutla.html](https://kaltengpos.co/berita/-35109-kunjungi_pulpis_komisi_iv_dapat_masukan_soal_kesejahteraan_relawan_satgas_karhutla.html)

<https://nasional.okezone.com/read/2019/11/08/337/2127358/klhk-dan-komisi-iv-dpr-tinjau-lokasi-karhutla-di-4-provinsi?page=2>

[http://www.menlhk.go.id/site/single\\_post/2495](http://www.menlhk.go.id/site/single_post/2495)

[http://rri.co.id/palangkaraya/post/berita/744232/daerah/komisi\\_iv\\_dpr\\_ri\\_tuntut\\_jaminan\\_kepastian\\_negara\\_pada\\_hutan\\_adat.html](http://rri.co.id/palangkaraya/post/berita/744232/daerah/komisi_iv_dpr_ri_tuntut_jaminan_kepastian_negara_pada_hutan_adat.html)

<https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/bandung/read/2019/11/07/16064011/kunjungan-ke-kalimantan-dedi-mulyadi-terima-masukan-soal-gaji-satgas>

<https://jabar.tribunnews.com/2019/11/07/di-kalimantan-dedi-mulyadi-sentil-nasib-relawan-satgas-karhutla-minta-pembakar-hutan-di-blacklist>

<https://kesatu.co/ke-kalimantan-dedi-mulyadi-dicurhati-relawan-terkait-minimnya-insentif/>

<https://kumparan.com/infopbun/dedy-muliadi-terlibat-karhutla-jangan-ampuni-korporasi-1sD0zVRBZTv>

<https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2019/11/08/datang-ke-kalimantan-dedi-mulyadi-dapat-masukan-soal-kesejahteraan-relawan-satgas-karhutla/>

<https://radarmalang.id/klhk-komisi-iv-dpr-mengunjungi-empat-provinsi-terdampak-karhutla/>

<https://banten.antaranews.com/berita/71659/dpr-industri-masif-berdampak-negatif-terhadap-pertanian>

<https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/JKRVag7K-legislatur-dorong-pemerintah-bentuk-relawan-pencegah-api>

<https://nasional.kompas.com/read/2019/11/08/18435961/cegah-karhutla-pada-2020-komisi-iv-dpr-ri-usulkan-beberapa-cara>

<https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/9K5rgpnN-perkembangan-industri-gerus-ruang-pertanian>

<http://www.koran-jakarta.com/klhk-komisi-iv-dpr-tinjau-beberapa-provinsi/>

<https://mediaindonesia.com/read/detail/270488-komisi-iv-dorong-pemerintah-cari-terobosan-cegah-karhutla-di-2020>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://nasional.sindone.ws.com/read/1457221/13/cegah-karhutala-warga-yang-buka-lahan-tanpa-bakar-diberi-insentif-1573279642&ved=0ahUKEwjb9pTevtZlAhX58HMBHUniB9cQxfQBCCgwAA&usq=A0vVaw2m9XWUJGai7Fgy5U9m9gn3>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20191109/15/1168572/dedi-mulyadi-korporasi-pelaku-karhutla-jangan-ditutup-tutupi>

<https://www.borneonews.co.id/berita/143991-pemprov-kalteng-bersama-komisi-iv-dpr-ri-bahas-penanganan-karhutla>

<https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kunjungan-ke-kalimantan-dedi-mulyadi-terima-masukan-soal-gaji-satgas-karhutla/ar-AAJZPO8>

<http://www.prfmnews.com/berita.php?detail=komisi-iv-dpr-ri-dorong-pemerintah-cari-terobosan-cegah-karhutla-di-2020>

<https://mediadayak.co.id/komisi-iv-dpr-ri-minta-mpa-miliki-tugas-pencegahan/radar>